

**MENTERI LUAR NEGERI RI  
RETNO L. P. MARSUDI**

**PENYAMPAIAN PRIORITAS POLITIK LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
2019-2024**

**Teman-teman media yang saya hormati,**

Didampingi oleh eselon 1 Kemlu, saya akan menyampaikan pokok-pokok prioritas politik luar negeri Indonesia untuk tahun 2019-2024.

Mohon maaf, Pak Wamenlu tidak dapat hadir karena harus kembali ke Washington DC untuk mengurus beberapa tugas disana.

Sebelum memasuki detail prioritas, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait situasi global yang ada saat ini dan landasan politik luar negeri Indonesia.

**Temans media yang saya hormati,**

Dunia yang kita tinggali saat ini adalah dunia yang diwarnai banyak ketidakpastian.

Ketidakpastian ini... tentunya telah menciptakan tantangan yang lebih besar bagi negara-negara dunia.

Kita melihat rivalitas pengaruh politik berjalan seiring dengan rivalitas ekonomi.

Konflik lama terus berlanjut, sebagian justru menunjukkan situasi yang lebih memburuk.

Sementara konflik baru terus bermunculan. Hal ini tentunya membuat situasi geopolitik dunia semakin berat.

Kita juga melihat terjadinya instabilitas dalam negeri di banyak negara.

Di bidang perdagangan, tren proteksionisme telah melahirkan hambatan dagang baru yang akhirnya menekan perdagangan global.

Akibatnya terjadi perlambatan perdagangan global sehingga pertumbuhan ekonomi global terus direvisi ke bawah.

Ditengah situasi dan tantangan yang semakin berat ini, kita, Indonesia masih bersyukur, mengingat ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5% dan stabilitas politik terjaga.

Ditengah gempuran proteksionisme, Indonesia memiliki aset yang luar biasa, yaitu pasar domestik yang besar dan terus bertumbuh.

Pasar dalam negeri yang besar menjadikan ekonomi Indonesia “indispensable” dalam perkembangan geo-ekonomi ke depan.

Banyak pihak memprediksikan bahwa berdasarkan *purchasing power parity*, Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat mulai tahun 2030 nanti.

Kondisi obyektif ini harus dikapitalisasi, tidak saja untuk kepentingan Indonesia, namun juga untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara di dunia.

## **Temans media ysh,**

Mengenai prinsip-prinsip dasar, saya ingin mengutip beberapa bagian dari paragraf ke-4 Mukadimah UUD 1945:

“...untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”

Ini adalah amanah konstitusi yang harus dijalankan oleh diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Dari paragraf tersebut, terdapat beberapa elemen yang merupakan amanah bagi pelaksanaan politik luar negeri, yaitu (i) melindungi seluruh bangsa Indonesia; (ii) melindungi tumpah darah Indonesia ; (iii) memajukan kesejahteraan umum; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Amanah ini membentuk ruh politik luar negeri Indonesia. Ruh tersebut harus terus terjaga dengan baik dan dilaksanakan sebagai satu kesatuan.

Selama 5 tahun yang lalu, Indonesia telah berhasil menjaga ruh tersebut, menjalankan politik luar negeri yang berdiri tegak, bermartabat dan berwibawa.

Dalam 5 tahun ke depan, ruh ini akan tetap dijaga. Kita ingin melihat diplomasi Indonesia yang berhasil memperjuangkan kepentingan nasional dan kita ingin melihat diplomasi Indonesia yang terus dapat berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia.

### **Temans media yang saya hormati,**

Presiden RI dalam Rapat Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, menyampaikan bahwa hanya ada satu visi dan misi yaitu visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Para Menteri diharapkan menjalankan visi dan misi sesuai dengan tupoksi masing.

Dengan mempertimbangkan amanah konstitusi dan visi misi Presiden/Wakil Presiden, maka prioritas Polugri 5 tahun kedepan merupakan kontinuitas dari pelaksanaan politik luar negeri 5 tahun ke belakang, ditambah beberapa penajaman di beberapa bagian. Penguatan antara lain dilakukan pada pelaksanaan diplomasi ekonomi.

Prioritas politik luar negeri Indonesia akan bertumpu pada prioritas 4+1, saya ulangi prioritas 4+1

## **Prioritas pertama, yaitu penguatan diplomasi ekonomi**

Beberapa langkah strategis dalam prioritas pertama ini antara lain adalah:

Pertama, kapitalisasi penguatan pasar domestik.

Sebagaimana telah saya sampaikan, Indonesia adalah pasar yang besar dengan lebih dari 260 juta jiwa.

Ini harus kita jadikan *leverage* atau daya tawar kita untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di tingkat bilateral maupun regional.

Hal yang harus diwaspadai adalah menjaga pasar domestik dari produk-produk yang masuk secara ilegal maupun dengan *dumping* atau disubsidi pihak asing. Pertumbuhan ekonomi global yang rendah saat ini menunjukkan peningkatan pelanggaran-pelanggaran dimaksud yang harus makin diwaspadai.

Langkah kedua, penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional

Diplomasi akan terus bekerja untuk memperkokoh kerja sama ekonomi yang strategis dan saling-menguntungkan dengan pasar tradisional Indonesia.

Sementara itu, langkah terobosan juga akan dilakukan untuk menembus pasar non-tradisional lebih banyak lagi.

Setelah menembus pasar Afrika melalui Indonesia-Africa Forum dan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue, BUMN dan swasta Indonesia akan terus melanjutkan *engagement* dengan Afrika di bidang perdagangan barang dan jasa, serta investasi termasuk pembangunan infrastruktur dan konstruksi di kawasan itu.

Hal yang sama juga dilakukan dengan kawasan non tradisional lainnya, yaitu Latin Amerika; Asia Selatan dan Tengah; serta Timur Tengah dan Pasifik.

Langkah ketiga, penguatan perundingan perdagangan dan investasi

Untuk memperkuat akses pasar, dalam 5 tahun kedepan, penyelesaian berbagai perundingan CEPA/FTA/PTA dengan berbagai negara akan dipercepat dengan catatan akan bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia dan saling menguntungkan.

Keempat, Promosi Terpadu Perdagangan dan Investasi serta Mendorong *Outbound Investment*

Upaya untuk mengintegrasikan promosi perdagangan dan investasi akan terus dilakukan agar promosi lebih terarah dan menghasilkan hal yang konkrit.

Promosi ke luar negeri akan dilakukan secara sinergis tentunya promosi ini harus dilakukan sejalan dengan perbaikan iklim usaha dan investasi di dalam negeri baik di tingkat nasional maupun di daerah sehingga memberikan hasil konkrit.

Dengan mulainya ekspansi BUMN dan sektor swasta Indonesia, sudah waktunya Indonesia juga mengembangkan kebijakan *outbound investment* ke luar negeri yang sinergis dengan kepentingan ekonomi nasional.

Berbagai *Bilateral Investment Treaty* kedepan akan juga difokuskan untuk melindungi investasi Indonesia di luar negeri secara adil.

Selain itu, Indonesia juga akan makin memfokuskan pada sektor dimana Indonesia memiliki nilai tambah dengan mengembangkan ekosistem dan kebijakan yang mendukung perkembangan industri-industri pengolahan sumber daya alam.

Di tahun 2020, Indonesia akan menggelar *Halal Summit 2020*. Sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia harus menjadi pemain utama dalam industri halal.

Diplomasi juga akan bekerja untuk mendorong produk unggulan yang berorientasi ekspor serta mendukung pembiayaan proyek infrastruktur dan industri strategis ke luar negeri.

Langkah-langkah ini penting dilakukan untuk memastikan produk unggulan yang berorientasi ekspor dapat terus didorong dan di saat yang sama, ekspansi peran perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri juga dapat difasilitasi.

Kelima, Diplomasi juga akan dioptimalkan untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia.

Kepentingan kelapa sawit Indonesia adalah hal fundamental karena menyangkut hajat kurang lebih 16 juta orang khususnya petani kecil dan keluarganya.

Kita akan terus menolak berbagai tindakan diskriminatif yang ditujukan terhadap kelapa sawit, karena bukan saja merugikan kepentingan nasional namun juga mengancam terpenuhinya kebutuhan mayoritas populasi dunia akan minyak nabati yang memenuhi kriteria SDGs.

Langkah keenam dan terakhir pada prioritas pertama Indonesia adalah mendorong ekonomi 4.0 yang meliputi industri digital, ekonomi kreatif dan pengembangan SDM Indonesia.

Kebijakan mendorong ekonomi 4.0 ini diperlukan baik untuk meningkatkan produktifitas berbagai industri di Indonesia, maupun untuk membuka akses yang makin besar bagi kelompok menengah-bawah ke pasar internasional, *financial inclusion* dan ekonomi kreatif sehingga pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin tinggi dan merata.

**Rekan-rekan Media yang terhormat,**

**Prioritas kedua, yaitu diplomasi perlindungan.**

Diplomasi perlindungan masih akan menjadi prioritas Politik Luar Negeri Indonesia dalam 5 tahun kedepan.

Negara harus terus hadir untuk melindungi warganya di luar negeri.

Dua capaian penting yang berhasil dilakukan selama ini adalah mengubah *mindset* kepedulian dan keberpihakan, yang saya sering sebut revolusi *mindset* perlindungan; serta pembangunan sistem dan inovasi.

Dua hal ini akan terus kita jaga dalam 5 tahun ke depan sehingga *mindset* secara baku menjadi *corporate culture*.

Beberapa hal yang akan dilakukan di bawah prioritas kedua:

Pertama, jika dalam 5 tahun yang lalu, Kemlu telah membuat portal peduli WNI dan mengintegrasikan data WNI dengan SIAK Dukcapil Kemendagri, SIMKIM Ditjen Imigrasi, SSKO-TKLN BNP2TKI, maka dalam 5 tahun ke depan, pengintegrasian akan juga dilakukan dengan lebih banyak K/L, contohnya SIMKAH Kemenag dan SAKE Ditjen AHU, Kemenkumham.

Jika pengintegrasian selesai dilakukan maka Indonesia akan memiliki "*one single data*" WNI di luar negeri, dan tentunya ini akan mempermudah dan memperkuat sistem perlindungan WNI di luar negeri.

Kedua, melalui kerja sama dengan KL terkait, Kemlu mendorong perbaikan tata kelola menuju migrasi aman, reguler dan teratur atau di forum PBB disebut sebagai *safe, orderly and regular migration*.

Indonesia akan terus aktif di berbagai forum internasional terkait migrasi.

Perbaikan tata kelola tersebut harus dilakukan secara parallel, pada tingkat domestik, bilateral, kawasan (ASEAN) dan tingkat internasional, baik pada tataran hulu dan tataran hilir.

Investasi pada upaya pencegahan.

Ketiga, upaya pencegahan – prevensi. Bagaimanapun mencegah jauh lebih murah dan efektif daripada mengobati.

Salah satu upaya pencegahan tersebut adalah penguatan edukasi publik.

Masyarakat perlu diberdayakan sebagai komponen utama perlindungan.

Penguatan upaya preventif ini juga akan mengurangi risiko besarnya korban perdagangan manusia.

### **Prioritas ketiga, yaitu diplomasi kedaulatan dan kebangsaan**

Diplomasi harus dapat bekerja untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI.

Penyelesaian batas-batas negara akan diintensifkan melalui perundingan.

Selain itu, kerja sama untuk menyebarkan toleransi, kemajemukan, dan demokrasi, sebagai identitas bangsa akan terus diintensifkan. Kerja sama melawan radikalisme dan terorisme juga akan diperkuat.

Diplomasi kedaulatan akan terus dipertebal. Kedaulatan Indonesia tidak dapat ditawar. Kita tidak akan mundur satu sentimeter pun untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.

### **Prioritas keempat, yaitu meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia**

Lima tahun ke depan merupakan tahun yang sangat sibuk bagi diplomasi Indonesia

Sampai akhir 2020, Indonesia masih akan duduk dalam Dewan Keamanan PBB. Isu kerjasama untuk *countering terrorism* akan menjadi fokus keketuaan Indonesia bulan Agustus 2020.

Pada tahun 2020-2022, Indonesia akan menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Beberapa prioritas selama keanggotaan di Dewan HAM, antara lain:

- Mendorong pemajuan dan perlindungan HAM baik di tingkat Kawasan maupun global. Kepentingan nasional dan negara berkembang akan menjadi rujukan kerjasama.
- Meningkatkan kapasitas negara-negara dalam penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM
- Memperkuat kemitraan yang sinergis dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM periode 2020-2024.
- Mendorong Dewan HAM PBB agar lebih efisien dan efektif, lebih objektif, transparan, adil, non-politis dan imparsial, serta membuka dialog dengan seluruh pihak dan berorientasi pada hasil.

Pada tahun 2020, Indonesia akan menjadi *Ketua Foreign Policy and Global Health/FPGH*. Indonesia akan mengusung tema *Affordable Health Care*.

Pada tahun 2023, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN.

Pada tahun 2023, Indonesia akan menjadi Ketua G-20.

ASEAN akan tetap menjadi soko guru politik luar negeri Indonesia.

ASEAN telah mengadopsi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dan dalam 5 tahun ke depan, Indonesia ingin memastikan implementasi kerja sama Indo-Pasifik akan berjalan.

Dalam kaitan inilah Indonesia berencana untuk menjadi tuan rumah "*ASEAN Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum*" pada tahun 2020.

Isu *women, peace and security*, akan tetap menjadi perhatian politik luar negeri Indonesia. Dalam kaitan ini, isu *women empowerment and democracy* akan menjadi topik bahasan dalam *Bali Democracy Forum*, yang akan diselenggarakan Desember 2019.

Selain itu, upaya untuk membentuk *Network Asia Tenggara* bagi negosiator dan mediator perempuan akan terus dijalankan dan mengkaitkannya dengan *networking* di bagian dunia lainnya.

Diplomasi perdamaian dan kemanusiaan akan dilanjutkan dengan tujuan memberikan kontribusi konkrit penyelesaian masalah, *Indonesia always wants to be part of solution*, antara lain:

- isu Rakhine State;
- perdamaian di Afghanistan;
- perdamaian di Palestina;
- kerjasama dalam rangka pencapaian SDGs, termasuk dengan negara-negara Pasifik.
- Penyelesaian perundingan *Code of Conduct (COC)* di Laut Cina Selatan.
- Penguatan Promosi dan Perlindungan HAM di ASEAN melalui AICHR.
- *Interfaith, Intermedia, Youth and Culture dialogue*

### **Teman-teman media yang saya hormati,**

Pelaksanaan politik luar negeri dan kontribusi Indonesia bagi perdamaian dan kemanusiaan, akan didukung melalui Indonesia-Aid atau "INDO-Aid". Indo-Aid telah diluncurkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tanggal 18 Oktober 2019.

Indo-Aid ini akan memperkuat profil diplomasi Indonesia; memperkuat peran Indonesia dalam melakukan kerja sama pembangunan Internasional; dan meningkatkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dengan negara mitra pembangunan.

### **Teman-teman media yang saya hormati,**

Selain 4 prioritas yang telah saya sampaikan, terdapat satu hal tambahan yang kita sebut plus 1 untuk dapat mencapai 4 prioritas di atas.

Berbagai prioritas di atas tidak akan dapat dicapai jika kita tidak memiliki infrastruktur diplomasi yang kuat.

Untuk itu, Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat infrastruktur diplomasi, serta mendidik para diplomat menjadi diplomat handal dan berkualitas

Beberapa hal yang akan menjadi fokus infrastruktur dan mesin diplomasi adalah Reformasi Birokrasi; Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Pembangunan Infrastruktur Fisik Diplomasi; Penguatan Pemanfaatan Teknologi dan Informatika; dan Transformasi Digital.

Tanpa transformasi digital, diplomasi Indonesia akan tertinggal oleh kemajuan era digital dewasa ini.

Digitalisasi diplomasi akan meningkatkan efektifitas, kualitas dan interaksi dalam berbagai pelaksanaan prioritas diplomasi.

Dalam kaitan ini, pada tahun 2020, Indonesia akan menjadi tuan rumah "*International Conference on Digital Diplomacy*" yang menjadi kelanjutan dari: "*Regional Conference on Digital Diplomacy*" yang diselenggarakan tahun ini.

Itulah teman-teman, prioritas Politik Luar Negeri dan Diplomasi tahun 2019-2024 yang kita sebut 4 +1.

Banyak pekerjaan besar yang akan kita lakukan selama 5 tahun kedepan.

Dengan kerja keras, *teamwork* yang solid, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain, Insya Allah tugas berat ini akan dapat kita lakukan bersama.

Demikian, terima kasih

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jakarta, 29 Oktober 2019